

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah yang paling diresahkan oleh bangsa Indonesia saat ini adalah masih dihadapkan dengan kemiskinan. Banyak sekali teori-teori yang menyebabkan kemiskinan serta memberikan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Kemiskinan bukan hanya menjadi sebuah masalah ekonomi saja tetapi juga menjadi masalah dari berbagai aspek seperti aspek sosial, kesehatan, dan juga aspek pendidikan. Untuk itu kemiskinan menjadi sebuah fokus untuk diberantas (Hasibuan, 2018).

Teori kemiskinan berasal dari teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurkse (1953), yang menjelaskan tiga penyebab utama kemiskinan, yaitu adanya keterbelakangan dan ketertinggalan Sumber daya Manusia (SDM) yang tercerminkan dari rendahnya indeks pembangunan manusia, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh rendahnya PDRB perkapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angka pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan, begitu seterusnya (Maisyarah, 2025).

Kemiskinan yaitu suatu kondisi dimana manusia serta penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka juga dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan yang paling pokok tersebut seperti makanan, pakaian, perumahan maupun lain-lain. Indonesia sebagai negara berkembang dan negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar tentu tidak dapat terhindar lagi dari masalah tersebut (latumaerissa, 2015). Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan juga merupakan suatu permasalahan yang tidak hanya dialami oleh negara berkembang namun juga dialami oleh negara- negara maju.

Menurut Perpres Nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemahaman mengenai “kemiskinan” mestilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (*right based approach*). Dalam pemahaman harus diakui bahwa seluruh masyarakat, laki-laki maupun perempuan mempunyai hak-hak untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat maka disebut dengan kemiskinan (Hendrawati, 2017).

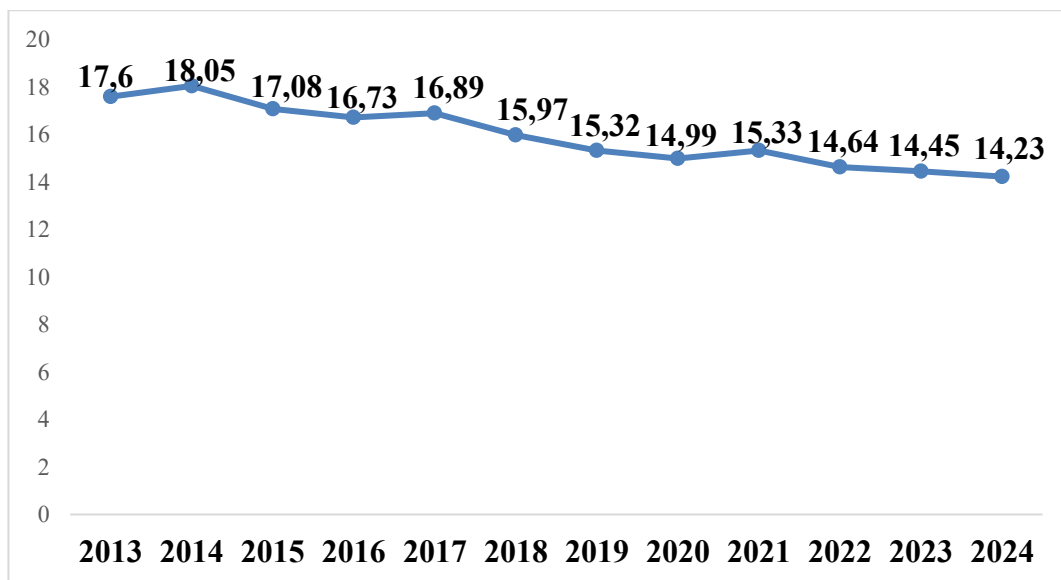
Pemerintah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan disetiap daerah yang ada di Indonesia. Beragam fasilitas, program dan bantuan dikucurkan agar pembangunan merata dan dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia tidak terkecuali dengan Aceh. Aceh dengan sejarah panjangnya selama bertahun-tahun mendapat perhatian khusus dari pusat salah satunya berupa dana OTSUS (Otonomi Khusus). Dana OTSUS (Otonomi Khusus) sudah dikucurkan dari tahun 2008 dan

berakhir pada tahun 2027. Dana ini berperan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengatasi kesenjangan sosial maupun perekonomian. Namun sepertinya kucuran dana OTSUS (Otonomi Khusus) ini tidak berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Hinestroza, 2018).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, menyatakan bahwa angka kemiskinan di Aceh merupakan yang terbesar di pulau Sumatra. Aceh merilis bahwa jumlah penduduk miskin sudah mengalami penurunan, tetapi masih tergolong sebagai penduduk miskin di Sumatera. Presentase penurunan angka kemiskinan di Aceh termasuk di urutan tertinggi kelima di Indonesia. Tetapi Aceh masih berada di urutan pertama penduduk miskin di Sumatera (Ummah, 2019). Provinsi Aceh masih dalam proses berusaha menuntaskan permasalahan kemiskinan. Kemiskinan tersebut merupakan efek dari perselisihan yang terjadi dalam 30 tahun silam dan bencana alam. Pada tahun 2004 telah terjadi tsunami dan gempa bumi yang memberikan dampak kemalangan dan kehancuran dalam ekonomi dan kemanusiaan. Pada tahun 2004 di Aceh mengalami peningkatan angka kemiskinan dari 28,4 persen menjadi 32,6 persen pasca tsunami ditahun 2005. Pasca tsunami, kemiskinan meningkat pada daerah yang terkena tsunami dan konflik. Tahun 2006 kemiskinan di Aceh mulai berkurang, sebesar 26,5 persen lebih rendah di bawah tingkat kemiskinan sebelum terjadinya tsunami (Kusuma & Widawati, 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh tercatat sebesar 15,33% pada tahun

2021 dan mengalami penurunan menjadi 14,64% pada tahun 2022. Berikut disajikan perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2013-2024:



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2013-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2026

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2013–2024 secara umum mengalami kecenderungan menurun, meskipun terdapat beberapa tahun yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan Provinsi Aceh tercatat sebesar 17,60 persen dan meningkat menjadi 18,05 persen pada tahun 2014. Peningkatan tersebut merupakan kenaikan tertinggi selama periode pengamatan. Kondisi tersebut berkaitan dengan tingginya beban pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama kebutuhan makanan, serta kondisi masyarakat perdesaan yang relatif lebih rentan terhadap kemiskinan. BPS mencatat bahwa pada Maret 2014 kontribusi komoditas makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 76,80 persen, dengan beras, rokok

kretek filter, serta ikan tongkol/tuna/cakalang sebagai beberapa komoditas yang memberikan kontribusi besar.

Tingkat kemiskinan selanjutnya mengalami penurunan dari 18,05 persen pada tahun 2014 menjadi 17,08 persen pada tahun 2015 dan kembali menurun menjadi 16,73 persen pada tahun 2016. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemiskinan di Aceh, yang tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin serta menurunnya persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Namun, pada tahun 2017 tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan menjadi 16,89 persen. Peningkatan tersebut terjadi di perkotaan maupun perdesaan dan berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan belum berlangsung secara konsisten dan masih dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2017, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 15,97 persen pada tahun 2018. Penurunan tersebut berlanjut menjadi 15,32 persen pada tahun 2019 dan 14,99 persen pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dalam beberapa tahun sebelum pandemi COVID-19. Meskipun demikian, penurunan kemiskinan tidak sepenuhnya terjadi secara merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan, sehingga masih terdapat perbedaan kondisi kesejahteraan antarkelompok masyarakat.

Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan kembali meningkat dari 14,99 persen menjadi 15,33 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada periode yang masih

dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Gangguan terhadap kegiatan ekonomi dan kesempatan memperoleh pendapatan dapat menyebabkan sebagian masyarakat mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan. Setelah itu, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 14,64 persen pada tahun 2022, 14,45 persen pada tahun 2023, dan mencapai 14,23 persen pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemiskinan setelah periode pandemi di wilayah perkotaan dan pedesaan.

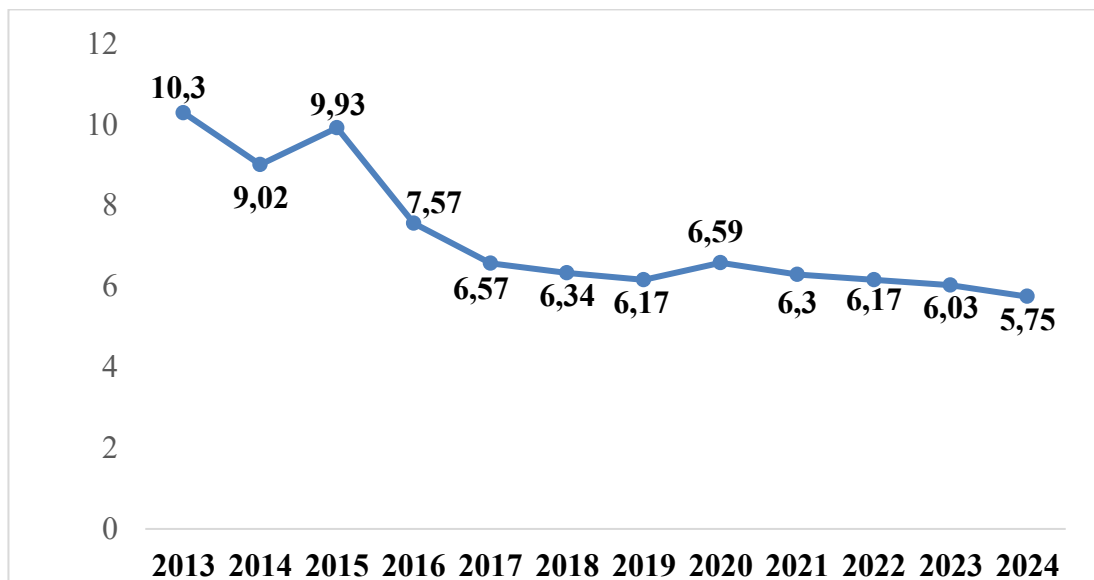
Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan Provinsi Aceh mengalami penurunan dari 17,60 persen pada tahun 2013 menjadi 14,23 persen pada tahun 2024 atau menurun sebesar 3,37 poin persentase. Meskipun demikian, masih terjadinya peningkatan pada beberapa tahun menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Provinsi Aceh belum sepenuhnya terselesaikan. Fluktuasi tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, seperti kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan dan pendapatan, perkembangan kegiatan ekonomi, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, khususnya pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Sukirno (2011), pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat sehingga menurunkan tingkat kemakmuran yang telah dicapai. Penurunan tingkat kemakmuran tersebut dapat menimbulkan masalah lain, yaitu

kemiskinan (Maisyarah, 2023). Angkatan kerja yang tumbuh cepat akan menambah beban tersendiri bagi perekonomian yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja maka bagian angkatan kerja itu akan memperpanjang barisan pengangguran yang sudah ada (Agustina *et.al*, 2019).

Pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan, artinya jika tingkat pengangguran meningkat maka angka kemiskinan juga mengalami peningkatan, pengangguran memberikan dampak yaitu dapat mengurangi pendapatan masyarakat sehingga dapat menyebabkan penurunan tingkatan kemakmuran dan kesejahteraan, hal ini dilatarbelakangi seseorang yang menganggur tidak mempunyai pemasukan atau pendapatan dan pekerjaan sehingga kebutuhannya tidak tercukupi dalam mengatasi hal ini seseorang harus bekerja untuk memperoleh penghasilan (Sari, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Sukirno (2011) yang menyatakan bahwa pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat sehingga menurunkan tingkat kemakmuran yang dicapai. Pengangguran dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial bagi individu yang mengalaminya (Adolph, 2016). Berikut disajikan perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh tahun 2013-2024.



Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh Tahun 2013-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2026

Gambar 1.2, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Aceh selama periode 2013–2024 secara umum menunjukkan tren menurun, meskipun terdapat beberapa tahun yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, TPT Aceh sebesar 10,30 persen dan menurun menjadi 9,02 persen pada tahun 2014. Penurunan tersebut berkaitan dengan berkurangnya jumlah penganggur dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2015 TPT kembali meningkat menjadi 9,93 persen. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah penganggur menjadi sekitar 217 ribu orang, sementara beberapa sektor mengalami penurunan jumlah penduduk yang bekerja. Selanjutnya, TPT kembali menurun menjadi 7,57 persen pada tahun 2016 dan 6,57 persen pada tahun 2017. Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah penganggur serta meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Aceh (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026).

Penurunan TPT berlanjut pada tahun 2018 dan 2019, masing-masing menjadi 6,34 persen dan 6,17 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja, antara lain pada sektor perdagangan, jasa pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Namun, pada tahun 2020 TPT kembali meningkat menjadi 6,59 persen. Peningkatan tersebut terjadi ketika aktivitas ekonomi mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. BPS mencatat jumlah angkatan kerja meningkat, tetapi jumlah pengangguran juga mengalami peningkatan dan terdapat perubahan struktur lapangan pekerjaan, termasuk meningkatnya proporsi pekerja informal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pandemi memberikan tekanan terhadap pasar tenaga kerja di Aceh

Setelah tahun 2020, TPT kembali menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu menjadi 6,30 persen pada tahun 2021, 6,17 persen pada tahun 2022, 6,03 persen pada tahun 2023, dan mencapai 5,75 persen pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar tenaga kerja setelah periode pandemi. Secara keseluruhan, TPT Provinsi Aceh menurun sebesar 4,55 poin persentase selama periode 2013–2024, dari 10,30 persen menjadi 5,75 persen. Meskipun demikian, masih adanya fluktuasi TPT menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut penting untuk dikaji karena tingkat pengangguran berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kemiskinan.

Selain tingkat pengangguran, kondisi perekonomian suatu daerah juga menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan

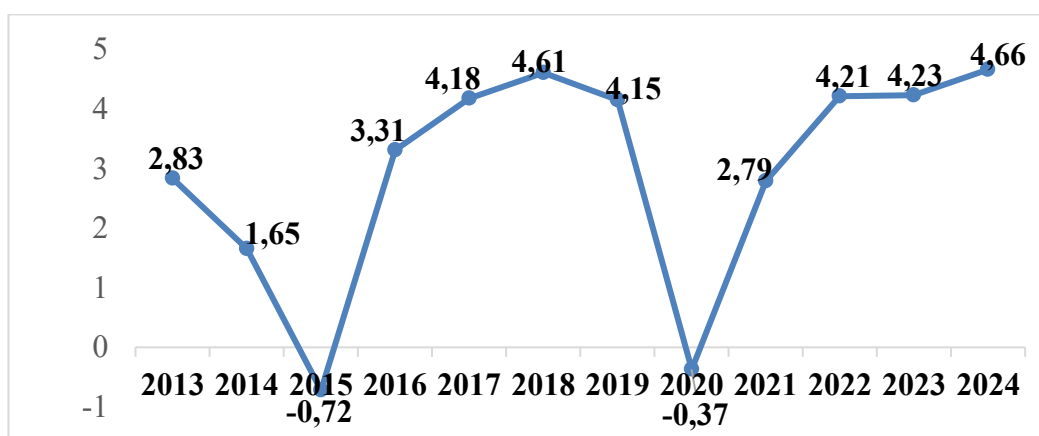
ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi yang dapat memengaruhi peningkatan output, pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan tersebut didukung oleh penelitian Wibowo dan Ridha (2021) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Pertumbuhan ekonomi menurut Kunarjo, adalah situasi yang menggambarkan produk domestik bruto per kapita suatu negara yang mengalami peningkatan (Safuridar, 2017).

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti

pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan 24 manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Prasatyo, 2010).

Terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan (Kuncoro, 2005). Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan menggambarkan bahwa belum adanya keseimbangan dalam meningkatkan PDB di Provinsi Aceh hal ini dapat terjadi karena belum adanya pemerataan pembangunan yang berorientasi untuk meningkatkan pendapatan di suatu wilayah (Manoppo *et.al*, 2021). Berikut disajikan perkembangan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2013-2024.



Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Tahun 2013-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2026

Gambar 1.3, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2013–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh tercatat sebesar 2,83 persen dan kemudian melambat menjadi 1,65 persen pada tahun 2014. Perlambatan tersebut menunjukkan adanya penurunan laju aktivitas ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami kontraksi sebesar 0,72 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Aceh mengalami tekanan, terutama karena masih kuatnya pengaruh sektor migas terhadap perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas yang justru mencapai 4,34 persen pada tahun 2015. Selain itu, pada periode tertentu juga terjadi penurunan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta ekspor luar negeri yang turut memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026).

Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2015, perekonomian Aceh mulai mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3,31 persen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 4,18 persen pada tahun 2017. Peningkatan tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas beberapa lapangan usaha, antara lain sektor konstruksi pada tahun 2016 serta sektor pertambangan dan penggalian dan ekspor luar negeri pada tahun 2017 (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026). Pertumbuhan ekonomi kemudian kembali meningkat menjadi 4,61 persen pada tahun 2018. Peningkatan tersebut antara lain didukung oleh pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta peningkatan ekspor luar negeri. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi masih berada pada kondisi positif sebesar

4,15 persen, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,61 persen.

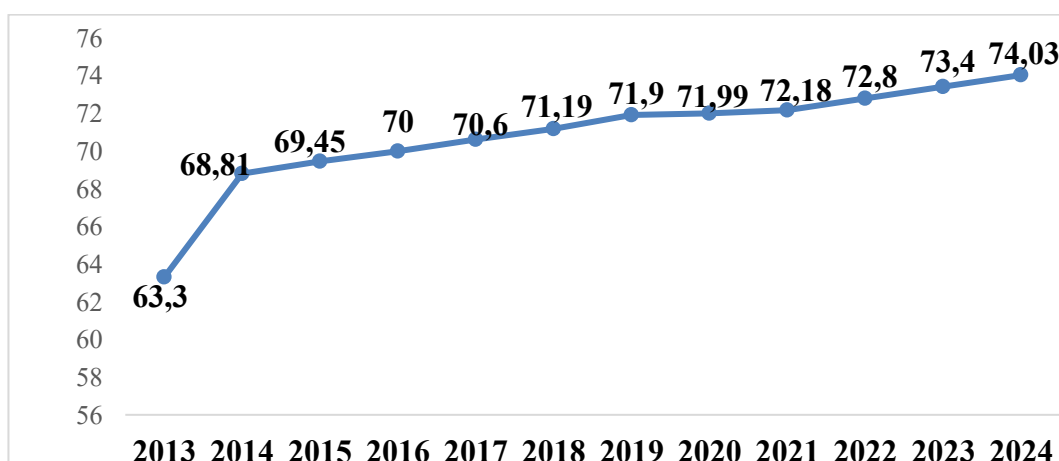
Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Aceh kembali mengalami kontraksi sebesar 0,37 persen. Penurunan tersebut berkaitan dengan tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang mengganggu berbagai aktivitas ekonomi. Salah satu sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah transportasi dan perdagangan, sedangkan dari sisi pengeluaran terjadi penurunan yang cukup besar pada impor luar negeri (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026). Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 2,79 persen pada tahun 2021 dan selanjutnya mencapai 4,21 persen pada tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses pemulihan aktivitas ekonomi setelah periode pandemi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Aceh kembali meningkat secara tipis menjadi 4,23 persen dan kemudian meningkat menjadi 4,66 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan menunjukkan semakin menguatnya aktivitas perekonomian Aceh.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2013–2024 menunjukkan pola yang tidak stabil, dengan kondisi kontraksi pada tahun 2015 dan 2020 serta periode pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian Aceh masih dipengaruhi oleh perubahan aktivitas berbagai sektor ekonomi. Kondisi pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan tingkat kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat

diharapkan dapat mendorong peningkatan kegiatan produksi, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang perlu dikaji dalam menganalisis tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh

Menurut Maipita (2014), *United Nations Development Programme* (UNDP) telah mengembangkan sejumlah indikator untuk mengukur kemiskinan. Indeks pembangunan manusia adalah ukuran kemiskinan. Ada juga klaim bahwa kerentanan yakni kesulitan mendapatkan pekerjaan adalah salah satu faktor penyebab kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan (Zanzibar *et.al*, 2024). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Investasi (modal), kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi satu sama lain saling terkait. Sulit bagi pemerintah menciptakan lapangan kerja baru tanpa pertumbuhan ekonomi tinggi. Sama sulitnya menciptakan lapangan kerja bagi penduduk miskin (masyarakat lokal) jika pertumbuhan ekonomi hanya ditopang kegiatan produksi dan membutuhkan tenaga kerja. Mayoritas masyarakat miskin adalah lulusan pendidikan dasar (SD) atau bahkan tidak tamat SD (Aswin, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia juga berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, IPM menjadi salah satu faktor yang perlu dikaji dalam menganalisis tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa IPM akan menurunkan jumlah tingkat kemiskinan. Bisa diartikan sebagai semakin besar IPM maka semakin kecil kemungkinan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan IPM di suatu wilayah baik tidaknya akan menunjukkan kualitas SDM yang baik sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Dalam mengukur tingkat IPM dilakukan dengan cara melihat pembangunan manusia berdasarkan dari ilmu pendidikan yang didapat dalam melek huruf, jumlah pendapatan yang mampu memenuhi kehidupan, serta kesehatan yang terjamin dan umur yang panjang (Ferayanti *et al.*, 2023). Berikut disajikan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh selama periode 2013-2024.



Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh Tahun 2013-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2026

Gambar 1.4, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh selama periode 2013–2024 menunjukkan tren yang meningkat. IPM Provinsi Aceh meningkat dari 63,30 persen pada tahun 2013 menjadi 74,03 persen pada tahun

2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Aceh yang tercermin melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 68,81 persen. Namun, peningkatan yang cukup tajam tersebut perlu dilihat dengan mempertimbangkan adanya perubahan metodologi penghitungan IPM yang mulai diterapkan BPS pada tahun 2014, sehingga perubahan nilai tidak sepenuhnya dapat diartikan sebagai peningkatan kondisi pembangunan manusia secara aktual.

Pada periode 2015–2019 IPM Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan secara bertahap dari 69,45 persen menjadi 71,90 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada berbagai komponen pembangunan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. BPS mencatat bahwa pada tahun 2019 angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, IPM tetap meningkat menjadi 71,99 persen tetapi pertumbuhannya melambat menjadi 0,09 poin. Kondisi tersebut terjadi pada periode pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga perkembangan pembangunan manusia menjadi lebih terbatas.

Setelah tahun 2020, IPM Provinsi Aceh kembali menunjukkan peningkatan, yaitu menjadi 72,18 persen pada tahun 2021 dan 72,80 persen pada tahun 2022. Peningkatan pada tahun 2022 mencapai 0,62 poin dan terjadi pada seluruh komponen pembentuk IPM, meliputi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per

kapita yang disesuaikan. Selanjutnya, IPM kembali meningkat menjadi 73,40 persen pada tahun 2023 dan 74,03 persen pada tahun 2024. Secara keseluruhan, tren tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Aceh mengalami perkembangan positif selama periode penelitian, meskipun tingkat peningkatannya berbeda pada setiap tahun.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menjadikan kemiskinan sebagai variabel terikat dengan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel bebas. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada tahun dan wilayah penelitian yang berbeda.

Penelitian Purboningtyas *et al.* (2020) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian Dewantari dan Rachmawati (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian Utami (2020) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia, kemiskinan dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Penelitian Derek *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara.

Penelitian Thesia *et al.* (2024) menunjukkan bahwa pengangguran dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian Baihaqi dan Puspitasari (2020) menunjukan hasil bahwa pengangguran,

indeks pembangunan manusia (IPM), zakat dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh.

Penelitian Nufus dan Husein (2021) menunjukkan bahwa PDRB dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sedangkan IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda menyangkut pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan. Sedangkan penelitian ini menggabungkan variabel pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel bebas dan melihat pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.

Adapun fenomena dalam penelitian ini bahwa Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatra meskipun telah memperoleh berbagai bentuk intervensi kebijakan dan bantuan fiskal, seperti Dana Otonomi Khusus (OTSUS) sejak tahun 2008. Meskipun terjadi tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, persentasenya tetap tinggi dibandingkan provinsi lain, yaitu mencapai 14,75 persen pada tahun 2022. Tingginya angka kemiskinan ini tidak sejalan dengan tren kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik pasca pandemi Covid-19.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Aceh masih tergolong tinggi dan

fluktuatif, mencapai puncaknya pada masa pandemi tahun 2020 sebesar 6,59 persen dan meskipun mengalami penurunan, angka tersebut tetap di atas rata-rata nasional. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan di mana kenaikan IPM dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan empiris mengenai sejauh mana pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan IPM secara simultan maupun parsial mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengkaji hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan kemiskinan untuk memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2013-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penjelasan penelitian di atas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2013-2024?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2013-2024?

3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2013-2024?
4. Bagaimana pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2013-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2013-2024
2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2013-2024
3. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2013-2024
4. Mengetahui pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2013-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan, menjadi refrensi bagi perkembangan ilmu ekonomi dan studi pembangunan yang terkait dengan pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Bagi penelitian-penelitian berikutnya, dapat dijadikan bahan referensi untuk dikembangkan lebih lanjut menyangkut pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Indonesia, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengentasan kemiskinan melalui penanganan dan perbaikan pada permasalahan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan khususnya yang terkait dengan permasalahan pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.